

United Nation Interim Administration for Kosovo (UNMIK): Pengaruh Organisasi Internasional PBB Terhadap Pembentukan Pemerintah di Kosovo

Nur Dwi Kristiningrum

*Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: nd.kristiningrum@yahoo.com

ABSTRACT

Kosovo has a long way to achieve its independence. The struggle of territory between ethnic Albanians in Kosovo with Serbs has led to occurrence of violent conflict. In 1999 NATO intervention to stop the conflict. After NATO has bombing Kosovo, United Nation form Kosovo yaitu United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) to maintain peace and security. However, UNMIK is not only create peacekeeping, but extends to participate in composing and arranging the government in Kosovo. According to Johan Galtung's theory, UNMIK has been able to resolve the conflict in Kosovo. The theory include peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. In addition, UNMIK has given its influence in the formation of independent.

Keywords: *pramodialist approach, peacekeeping, state-building theory.*

Kosovo telah melewati jalan yang panjang untuk mencapai kemerdekaannya. Perebutan wilayah antara etnis Albania di Kosovo dengan masyarakat Serbia telah menyebabkan terjadinya konflik kekerasan di wilayah tersebut. Pada tahun 1999 NATO melakukan intervensi untuk menghentikan konflik tersebut. Pada tahun yang sama, PBB membentuk badan untuk menjaga keamanan dan perdamaian untuk Kosovo yaitu United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Namun peran UNMIK tidak hanya untuk peacekeeping, melainkan meluas untuk ikut serta dalam menyusun dan mengatur pemerintahan di Kosovo. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Johan Galtung, UNMIK telah mampu menyelesaikan konflik di Kosovo. Teori tersebut meliputi peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding. UNMIK mampu melakukan peacebuilding di wilayah Kosovo hingga memberikan pengaruhnya dalam pembentukan negara yang merdeka.

Kata-kata Kunci: *pendekatan pramodialis, peacekeeping, teori state-building.*

Kosovo merupakan salah satu provinsi di negara bekas Yugoslavia, yang memiliki otonomi khusus dibawah pemerintahan Serbia. Setelah berakhirnya perang di Yugoslavia, Tito presiden Yugoslavia membagi negara tersebut menjadi Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, dan Macedonia (Jansen 2008). Namun Kosovo tidak dipisah menjadi negara tersendiri oleh Tito, melainkan menggabungkannya dibawah pemerintahan Serbia. Sebagian besar Kosovo dihuni oleh etnis Albania yang memeluk agama Islam dan hanya sedikit etnis Serbia yang tinggal di Kosovo. Pada tahun 1967, Tito mengunjungi Kosovo untuk pertama kali. Dia melakukan pengusiran terhadap orang Serbia yang paling dibenci di Kosovo yaitu Alexander Rankovic (Jansen 2008). Peristiwa tersebut menciptakan kegembiraan diantara etnis

Albania dan memberikan ruang yang lebih untuk etnis Albania mengatur wilayah mereka. Selain itu, jumlah etnis Albania mulai meningkat karena besarnya jumlah kelahiran serta diiringi dengan banyak bangsa Serbia yang keluar dari Kosovo. Perkembangan dan kemajuan Kosovo semakin terlihat ketika Tito menetapkan Kosovo sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus dibawah pemerintahan Serbia yang menyebabkan etnis Albania memiliki derajat yang sama dengan etnis Serbia.

Kemajuan Kosovo memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengaturan sistem yang lebih baik di wilayah tersebut. Namun stabilitas Kosovo mulai memburuk setelah kematian Tito pada 4 Mei 1980 (Jansen 2008). Peristiwa tersebut memicu terjadinya kemarahan dan kericuhan di Kosovo. Awal kericuhan tersebut dipicu oleh kesedihan yang mendalam oleh pelajar di Prestina University yang kemudian menyebar diseluruh Kosovo. Ketidakstabilan yang terjadi di Kosovo mulai meningkat dengan banyaknya rumah dan toko di Serbia dan Montenegro yang terbakar akibat kerusuhan. Akibat dari perbuatan para pelajar dan beberapa etnis Albania tersebut, memicu kemarahan etnis Serbia yang kemudian berdampak kepada serangan balasan yang dilakukan oleh penduduk Serbia oleh etnis Albania khususnya di Pristina University.

Protes terorganisir pertama kali oleh penduduk Kosovo terjadi pada 1986. Kejadian tersebut memperkuat pernyataan sebagian penduduk Serbia untuk mengurangi keistimewaan yang dimiliki oleh Kosovo (Jansen 2008). Dan pada Februari 1987 pemerintah Serbia menyatakan untuk mengambil otonomi khusus Kosovo. Pada tahun yang sama Slobodan Milosevic telah menjadi presiden Serbia yang baru. Selama masa pemerintahannya, Milosevic telah banyak melakukan penekanan kepada Kosovo yang sebagian besar adalah etnis Albania yang memeluk agama Islam. Milosevic melakukan amandemen pada undang-undang Serbia yang sebagian besar peraturannya menghapuskan hak-hak yang dimiliki oleh etnis Albania.

Selama tahun 1980-an hingga 1990-an konflik kekerasan antara penduduk Serbia dan etnis Albania terus berlangsung dan meningkat. Hingga menimbulkan perhatian dari masyarakat Internasional dan tahun 1999 NATO melakukan intervensi ke wilayah Kosovo dengan menjatuhkan bom ke wilayah tersebut. Intervensi tersebut bertujuan untuk mengakhiri *ethnic cleansing* terhadap etnis Albania yang dilakukan oleh Milosevic. Untuk mengakhiri intervensi yang dilakukan NATO, organisasi internasional PBB membentuk badan untuk menjaga keamanan dan menciptakan perdamaian di Kosovo yaitu *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK). Dengan keterlibatan UNMIK dalam menciptakan perdamaian di Kosovo, memberikan Kosovo status baru sebagai negara dalam perlindungan PBB. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, timbul pertanyaan sejauh mana pengaruh UNMIK dalam pembentukan Kosovo sebagai negara yang merdeka?

Terdapat tiga kerangka pemikiran untuk memahami makalah ini, yaitu dilihat melalui pendekatan pramodialis, teori resolusi konflik Johan Galtung dan teori *state-building*. Pendekatan pramodialis menjelaskan penyebab terjadinya konflik etnis antara etnis Albania dengan masyarakat Serbia. Sedangkan teori resolusi konflik digunakan untuk menjelaskan peranan UNMIK dalam menciptakan *peacekeeping*. Serta teori *state-building* digunakan untuk menjelaskan pengaruh UNMIK terhadap kemerdekaan Kosovo.

***United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK):
Salah Satu Badan Keamanan dan Perdamaian Dunia dibawah Dewan
Keamanan PBB***

UN(*United Nation*) atau yang biasa disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia. Sebelum terbentuknya PBB, telah dibentuk organisasi yang memiliki tujuan yang sama ketika Perang Dunia Pertama yaitu *the League of Nations* (LBB). LBB didirikan pada tahun 1919 dalam perjanjian Versailles yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Namun, tujuan organisasi untuk menjaga perdamaian gagal karena tercetus Perang Dunia kedua. Selama Perang Dunia Kedua, 26 negara membentuk organisasi baru untuk menjaga perdamaian dunia yang dipelopori oleh presiden Amerika Serikat Franklil D. Roosevelt. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1942 PBB telah mendaatkan perserujuan dari negara-negara anggota sebagai organisasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia (un.org 2013).

PBB telah membuktikan perannya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia dengan membantu meredam konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara. Seperti mendirikan institusi khusus dalam menjaga keamanan dan perdamaian dengan membentuk *United Nations Interim Force* (UNIFIL) di Lebanon, *United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo* (UNMONUC) di Demokrasi Republik Kongo, dan *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK) di Kosovo (Alexandra t.t.). Pembentukan institusi khusus tersebut memiliki tujuan untuk lebih memfokuskan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan memberikan perhatian khusus terhadap konflik tertentu, PBB memberikan wewenang bersama-sama negara anggota untuk pencapaian tujuan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) merupakan badan khusus dibawah naungan Dewan Keamanan PBB yang memiliki misi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Kosovo. UNMIK didirikan pada 10 Juni 1999 menandai berakhirnya intervensi yang dilakukan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang diikuti dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh Serbia. UNMIK menetapkan pemerintahan sementara untuk Kosovo dibawah orang-orang yang memiliki otonomi kuat dalam pemerintahannya sendiri. Selain itu UNMIK dibantu oleh Kosovo membuat langkah yang penting dalam membangun dan mengkonsolidasi demokrasi dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan sementara dan menciptakan fondasi untuk fungsi ekonomi (un.org 2013).

Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ke 4011 yang membicarakan tetang konflik di Kosovo telah menghasilkan kesepakatan langkah-langkah resolusi untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Kosovo.¹ UNMIK sebagai hasil dari pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa poin yang kemudian menjadi awal dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di Kosovo.

Resolusi yang tercantum dalam persetujuan pembentukan UNMIK meliputi beberapa misi yaitu melakukan fungsi administrasi dasar, mengembangkan pembentukan otonomi yang kuat oleh pemerintah Kosovo, memfasilitasi proses politik untuk menentukan status Kosovo di masa depan, mengkoordinasikan kemanusiaan dan

¹Pada pertemuan ini telah dihasilkan resolusi 1244 yang berisisi tentang persetujuan untuk menyusun pemerintahan sementara dalam menstabilkan Kosovo dan melindungi serangan atau munculnya konflik dengan Serbia.

bantuan dari semua badan internasional, mendukung rekonstruksi infrastruktur utama, menegakkan ketertiban hukum, memajukan hak asasi manusia dan menjamin keamanan semua pengungsi dan orang terlantar kembali ke rumah mereka di Kosovo tanpa hambatan.

UNMIK memiliki empat pilar dibawah pimpinan *Special Representative of the Secretary General* (SRSG), yaitu: (1) bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR); (2) pemerintahan sipil; (3) demokratisasi dan pengembangan institusi yang dipimpin oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE); dan (4) rekonstruksi dan pembangunan ekonomi yang dikelola oleh Uni Eropa (un.org 2013). Keempat pilar tersebut memberikan wewenang kepada Kosovo untuk ikut serta dalam mengatur pemerintahannya, namun dengan campur tangan UNMIK.

Kurang dari dua tahun UNMIK melakukan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan perdamaian di Kosovo, pada Mei 2001 UNMIK menyetujui kerangka konstitusional Kosovo atau *Constitutional Framework for Provisional Self-Government* (Naegle t.t). Kerangka tersebut berisi tentang peraturan untuk menciptakan pemerintahan sementara dalam pembangunan dibidang politik, ekonomi dan sosial-budaya di Kosovo. Selain itu, UNMIK juga melakukan pembangunan Kosovo dalam bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, beberapa layanan publik, perdagangan dan industri, finansial dan ekonomi, lingkungan, dan transportasi dan komunikasi melalui kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*.

UNMIK memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan Kosovo sebagai provinsi yang masih kosong pemerintah akibat konflik kekerasan di wilayah tersebut. Pengaruh yang diberikan tidak hanya untuk melindungi hak asasi manusia dalam menciptakan perdamaian dunia, namun pengaruh tersebut diberikan mulai hak yang paling mendasar hingga pembentukan pemerintah yang dibutuhkan suatu wilayah untuk menjadi sebuah negara. Melalui tugas yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada UNMIK, secara bertahap Kosovo menjadi negara yang mampu berdiri sendiri tanpa pemerintahan di bawah Serbia.

Pendekatan Pramadialis dalam Memahami Konflik di Wilayah Kosovo

Pendekatan pramadialis merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana sejarah dari masing-masing pihak yang berkonflik dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam pendekatan ini menyatakan bahwa "the urge to define and reject the other goes back to our remotest human ancestors, and indeed beyond them to our animal predecessors" (Lewis 1992). Melalui pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana identitas suatu kelompok memiliki arti yang sangat penting untuk pengakuan dan penetapan keberadaan etnis tersebut.

Konflik yang terjadi di Kosovo dapat dilihat dari kebencian yang muncul dari penduduk Serbia akibat etnis Albania mengusir penduduk Serbia yang pada waktu itu sedang berjaya pada masa pemerintahan kerajaan Ottoman. Namun sebelum kejayaan tersebut, etnis Serbia telah menduduki wilayah Kosovo terlebih dahulu, sehingga penduduk Serbia ingin merebutnya kembali.

"Albanians claim that they are its original inhabitants, being the descendants of the ancient Illyrians. The Serbs say that Kosovo lay at the heart of its medieval kingdoms and that during the middle ages few, if any

Albanians lived amongst them. The Serbs buttress their claim by pointing to their ancient monasteries and churches which dot the landscape” (news.bbc.co.uk 2013).

Sejarah dari kedua etnis tersebut menunjukkan bahwa suatu identitas dapat berpengaruh terhadap kepemilikan suatu wilayah tertentu. ”*National are particular forms of collectivity that are constituted by a process of creating histories. The past gives this particular form of imagined community a potent claim to territory, the homeland*” (Suny t.t., 869-870). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejarah menjadi suatu penopang dan pendorong suatu etnis dalam merebut daerah yang dianggap merupakan *homeland* bagi mereka.

Kerangka Teori Konflik Johan Galtung dan Penerapannya dalam Konflik Kosovo

Istilah resolusi konflik merujuk pada pendekatan analisis dari sumber dalam situasi konflik antara pihak yang berkonflik. Istilah tersebut juga meliputi proses dimana pemilihan kebijakan dan institusional yang ditemukan dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang sedang berkonflik untuk membentuk dasar dalam resolusi konflik (Burton 1986, 125-130). Resolusi konflik juga dapat dimengerti sebagai sebuah pendekatan analisis dari penyebab dan cara penyelesaian konflik. Untuk mencapai sebuah resolusi tersebut, sebuah kelompok (negara atau individu) harus menganalisis kembali apa yang menjadi tujuan mereka sehingga dapat mengurangi bahkan mengakhiri sebuah konflik yang sedang terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut (Graham et al t.t, 94-95).

Johan Galtung merupakan salah satu ahli dalam bidang konflik dan resolusi konflik. Dia melihat konflik dan resolusi konflik sebagai sebuah segitiga yang saling berhubungan. Segitiga konflik tersebut terdiri dari *contradiction* (C), *attitude* (A), dan *behaviour* (B) pada puncaknya. *Contradiction* (C) merujuk kepada situasi konflik dasar yang mencakup anggapan ketidaksesuaian tujuan antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial. *Attitude* (A) meliputi persepsi dan *misperceptions* para pihak antara satu dengan yang lain dan dari mereka sendiri dapat berupa positif dan negatif. Sedangkan *behaviour* (B) meliputi kerjasama atau paksaan, sikap yang menandakan perdamaian atau permusuhan. Berdasarkan paparan diatas, ketiga komponen dari konflik tersebut harus digambarkan secara bersamaan, karena apabila salah satu tidak dapat terpenuhi akan menyebabkan konflik laten.

Konflik yang terjadi di Kosovo dapat digambarkan seperti segitiga yang dijelaskan oleh Galtung. Pada komponen *contradiction* (C) konflik Kosovo dapat digambarkan sebagai adanya perbedaan tujuan antara etnis Albania dengan penduduk Serbia khususnya pemerintahan Serbia. Etnis Albania pemeluk agama Islam memiliki tujuan yang berbeda dengan pemerintah Serbia yang sebagian besar beragama Nasrani ortodoks. Penghapusan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh etnis Albania, menimbulkan kemarahan dan kekecewaan terhadap pemerintah Serbia yang ketika itu dipimpin oleh Slobodan Milosevic.

Pada komponen *attitude* (A), dapat dilihat dari masing-masing persepsi yang dibangun oleh pihak yang berkonflik yaitu antara etnis Albania yang ada di Kosovo dengan etnis Serbia. Dalam konflik Kosovo terlihat dengan jelas bagaimana sejarah yang menggambarkan perpecahan antara kedua etnis tersebut yang diakibatkan oleh tujuan yang berbeda dan menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Munculnya persepsi

negatif dari etnis Albania terhadap pemerintah Serbia disebabkan oleh sikap pemerintah Serbia dengan melakukan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Albania.

Munculnya persepsi negatif antar kedua etnis tersebut kemudian menimbulkan perilaku bermusuhan antar satu dengan yang lain. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Galtung, perilaku permusuhan terdapat pada komponen *behaviour* (B). Dalam komponen ini, permusuhan tersebut memiliki karakteristik adanya ancaman yang dapat menyebabkan serangan destruktif.

Konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut kemudian menimbulkan keinginan untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam situasi ini, Galtung menjelaskan bagaimana konflik tersebut dapat disusun hingga menemui resolusi dari konflik tersebut. Proses tersebut meliputi *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* merupakan proses dimana ada salah satu pihak diluar dari pihak yang berkonflik melakukan pengurangan hingga memberhentikan konflik. Dalam proses ini dilakukan oleh NATO yang ketika itu melakukan pengeboman di wilayah Kosovo untuk menghentikan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh Slobodan Milosevic. *Peacekeeping* juga dilakukan oleh PBB dengan membentuk UNMIK untuk menghentikan konflik tersebut.

Setelah menghentikan konflik, proses selanjutnya adalah *peacemaking*. *Peacemaking* diartikan sebagai proses pertemuan antar pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi. Dalam proses ini, UNMIK mempertemukan kedua pihak yang berkonflik yaitu etnis Albania di Kosovo dengan etnis Serbia dengan bantuan Uni Eropa sebagai mediator. Proses selanjutnya adalah *peacebuilding* yaitu merupakan proses pembangunan perdamaian dengan tindakan-tindakan untuk mencegah munculnya konflik, serta tindakan yang dilakukan untuk memperkuat perdamaian.

UNMIK telah bertindak sebagai *peacekeeping*, namun juga sebagai *peacebuilding*. *Peacekeeping* yang dilakukan oleh UNMIK berupa persetujuan resolusi 1244 pada tahun 1999 atau disebut dengan *Under UN Security Council Resolution* (UNSCR) 1244 dan menetapkan Kosovo sebagai wilayah dibawah perlindungan PBB. Pencapaian tujuan perdamaian yang dilakukan oleh UNMIK dilanjutkan pada tahun 2001 dengan menegembangkan dan menjalankan pemerintahan sementara atau *Provisional Institutions of Self Government* (PISG) sesuai dengan *Constitutional Framework*. Dengan keterlibatan masyarakat Kosovo dalam membangun pemerintahannya, kemudian menjadi dasar dan bekal untuk menjadi negara yang merdeka dan diakui oleh dunia, namun setelah kesepakatan dengan UNMIK berakhir.

State Building:

Mandat UNMIK dalam Pembentukan Kosovo Sebagai Negara Merdeka

Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa mandat atau tugas UNMIK di Kosovo lebih cenderung kepada peran sebuah badan untuk pembentukan sebuah negara, bukan sebagai badan penjaga dan pencipta keamanan dunia dibawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Mandat tersebut didasarkan pada pembentukan *Provisional Institutions of Self Government* (PISG) sesuai dengan *Constitutional Framework* yang disetujui pada tahun 2001. Kondisi yang demikian juga menunjukkan bahwa UNMIK memberikan pengaruh yang kuat terhadap *state building* Kosovo.

Terdapat kebingungan tentang arti *state-building*, Zoe Scott menjelaskan bahwa “*state-building refer to interventionist strategies to restore and rebuild the institutionis and apparatus of the state*”(Zoe 2007). Adanya keterlibatan pihak luar dalam sebuah negara disebabkan adanya ketidak mampuan negara tersebut untuk menjaga ketentraman negaranya. Negara lemah cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kebutuhan tersebut meliputi kestabilan politik, perkembangan ekonomi, penyediaan layanan publik, perawatan kesehatan dan penciptaan sosial-budaya yang harmonis.

Dalam hal ini yang mampu melakukan intervensi terhadap suatu negara adalah organisasi internasional yaitu PBB yang memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. UNMIK sebagai badan penjaga dan pencipta perdamaian telah menunjukkan pengaruhnya terhadap pembangunan Kosovo. Perngaruh tersebut diawali dengan penerapan *Security Council Resolution 1244*. Pada ayat 11 diuraikan bahwa UNMIK memiliki kekuasaan untuk menunggu penyelesaian akhir dan menunggu penyelesaian politik (Hebir 2007).

UNMIK dan *Special Representative (SR)* memiliki tugas khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibawah naungan PBB, atas nama UNMIK, SR memiliki kekuasaan untuk membubarkan majelis Kosovo dan mengadakan pemilihan baru, memiliki otoritas untuk menunjuk, menghapuskan jabatan dan menertibkan hakim dan jaksa, melaksanakan kuasanya atas lembaga penegak hukum, dapat menahan persetujuan anggaran, melakukan hubungan eksternal dan secara pribadi menunjuk anggota Dewan ekonomi dan fiskal, Dewan Perbankan dan Pembayaran otoritas Kosovo, kepala Eksekutif Layanan Bea Cukai dan Pajak (Hebir 2007).

Melalui SR, UNMIK telah menggambarkan kekuasaan yang tidak terbatas atas wilayah Kosovo. Hal ini menyebabkan kurangnya peran dan wewenang masyarakat Kosovo untuk ikut serta dalam pembangunan negaranya. Selain itu, peran UNMIK juga menunjukkan bahwa badan tersebut dibentuk tidak hanya untuk menjaga perdamaian atau *peacekeeping*, namun meluas kearah peran yang dibentuk untuk ikut serta dalam pembentukan sebuah negara.

Kesimpulan

Konflik kekerasan yang terjadi di Kosovo antara Serbia dan etnis Albania mendorong masyarakat internasional untuk ikut berperan dan bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK) merupakan badan dibawah Dewan Keamanan PBB yang memiliki tugas untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan kedamaian atas masalah Kosovo. Tugas yang dimiliki UNMIK tidak hanya terbatas untuk menciptakan perdamaian, namun mereka juga menjadi peran pendukung terbentuknya Kosovo hingga menjadi sebuah negara. Peran tersebut ditunjukkan dengan menyusun pemerintahan sementara di Kosovo, yang kemudian menjadi landasan negara tersebut dapat menjadi negara merdeka.

Daftar Pustaka

Buku

Griffiths, Martin. 2001. *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrifindo Persada.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel Online

Blagojevic, Bojana. 2009. "Causes Of Ethnic Conflict: A Conceptual Framework" [online]. dalam <http://globalaffairsjournal.org> [diakses 25 November 2013]

Harrington, R Alexandra. 2005. "A Tale of Three Nations?: The Role of United Nations Peacekeepers and Mission on the Concept of Nation-State, Nationalism, and Ownership of the State in Lebanon, the Democratic Republic of Congo, and Kosovo" [online]. dalam <http://law.bepress.com/expresso/eps/867/> [diakses 25 Desember 2013]

Rees, Edward. 2005. "Public Security Management and Peace Operation Kosovo and UNMIK: Never Land" [online]. dalam <http://www.dcaf.ch/content/download/37029/529275/version/1/file/> [diakses 25 Desember 2013]

_____. 2005. *Violent Conflict and Democracy-Risks and Opportunities*. Sweden: Uppsala Universitet.